

ABSTRAK

Ali Azhar Syihabuddin: Antara Dunia Melayu dan Turki-Utsmani: Jejak Hubungan Diplomatik antara Kerajaan Riau-Lingga dan Kesultanan Utsmani (1856-1858).

Ekspansi kolonial Belanda pada abad ke-19—melalui Perang Riau (1782–1784), Traktat London (1824), dan Kontrak 1830—mempersempit kedaulatan Kerajaan Riau-Lingga sekaligus membatasi hak hubungan luar negerinya. Di tengah tekanan tersebut, jaringan haji, ulama, dan tarekat yang menghubungkan Dunia Melayu dengan Mekkah dan Istanbul memperkuat pandangan bahwa Kesultanan Utsmani adalah pusat legitimasi politik sekaligus simbol persatuan umat Islam. Pada 1856, Yang Dipertuan Muda Raja Ali Ja'far mengirimkan surat kepada Sultan Abdülmecid I, menandai awal hubungan diplomatik Riau-Lingga–Utsmani yang direspons pada 1858.

Penelitian ini bertujuan mengetahui, pertama, konteks sejarah yang melatarbelakangi hubungan awal Dunia Melayu dan Kesultanan Utsmani; dan kedua, proses terjalannya hubungan diplomatik antara Kerajaan Riau-Lingga dan Kesultanan Utsmani pada 1856–1858.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dengan pendekatan sosiologi sejarah. Sumber penelitian terdiri atas arsip Kesultanan Utsmani (*Başkanlığı Osmanlı Arşivleri*/BOA), surat-surat diplomatik, dokumen sezaman, serta naskah Melayu yang berkaitan dengan hubungan Riau-Lingga dan Kesultanan Utsmani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan diplomatik Riau-Lingga dengan Kesultanan Utsmani berakar pada keterhubungan historis Dunia Melayu dengan pusat-pusat Islam sejak abad ke-16, melalui jaringan perdagangan, haji, ulama, dan tarekat, serta ditopang oleh mentifak "Raja Rum" yang menegaskan otoritas Utsmani sebagai *Khadimul-Haramain*. Di tengah kedaulatan yang dibatasi Kontrak 1830, elite Bugis pemegang jabatan Yang Dipertuan Muda memanfaatkan jaringan keagamaan tersebut—termasuk Tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah—untuk membangun legitimasi politik dari Utsmani. Surat Raja Ali Ja'far kepada Sultan Abdülmecid dikirim melalui utusan dan jaringan ulama di Mekkah menuju Istanbul; Utsmani menerima misi tersebut dan meresponsnya dengan medali *Mecidi* kelas tiga serta izin pencantuman nama Sultan dalam khotbah Jumat. Pengakuan ini menegaskan bahwa hubungan tersebut bukan sekadar upaya mencari perlindungan politik, melainkan strategi Riau-Lingga menempatkan diri dalam arus utama dunia Islam—namun tetap bersifat simbolik, tanpa dukungan politik-militer nyata, karena Utsmani sendiri terikat kebijakan *Tanzimat* pascakongres Paris 1856, sehingga hubungan ini kuat secara ideologis tetapi rapuh di hadapan hegemoni kolonial Belanda.